

PARTISIPASI PEREMPUAN DAN ORANG MISKIN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG RESPONSIF GENDER MELALUI MUSRENBANG DI KABUPATEN KONAWE¹*Sartiah Yusran²***ABSTRAK**

Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman dan pengetahuan perempuan dan orang miskin tentang pentingnya keterlibatan mereka di dalam pembangunan dan pemahaman mereka tentang haknya berpartisipasi di dalam pembangunan melalui musrenbang, serta harapan mereka tentang langkah-langkah selanjutnya. Survei ini fokus pada perempuan dan orang miskin di Kabupaten Konawe sebagai populasi dan sampel yang telah ditentukan dari beberapa representatif yang mewakili beberapa kecamatan wilayah kerja UNDP (5 kecamatan). Hasil survei menunjukkan beberapa hal, yakni: a) istilah "musrenbang" (musyawarah perencanaan pembangunan) populer di kalangan perempuan dan orang miskin. Mereka pun kerap mengikutinya; b) tidak sampai separuh dari perempuan dan orang miskin yang mengetahui arti penting musrenbang; c) sebagian besar perempuan dan orang miskin menyetujui proses musrenbang namun tidak semua dari mereka menilai program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan mampu menjawab masalah perempuan dan orang miskin; d) sebagian besar perempuan dan orang miskin merasa tidak puas dengan partisipasi mereka dalam pembangunan. Oleh karena itu, mereka menganggap penting untuk dilibatkan secara optimal.

Kata kunci: partisipasi, responsif, gender, musrenbang

ABSTRACT

This survey aims to determine the extent of understanding and knowledge of the women and the poor people about the importance of their involvement in the development and their understanding of their rights to participate in development through Musrenbang, as well as their expectations about the next steps. This survey focused on women and the poor in Konawe as the sample and population who have been determined from several representative that representing several districts of UNDP work areas (5 districts). The survey results indicate several things, namely: a) the term "musrenbang" (development planning) is popular among women and the poor. They often follow it; b) less than half of women and poor people who know the importance of musrenbang; c) the majority of women and poor people approve musrenbang but not all of them to assess the programs that have been planned and implemented able to address the problems of women and the poor; d) mostly women and poor people are not satisfied with their participation in development. Therefore, they consider it important to be involved optimally.

Key words: participation, responsive, gender, musrenbang

A. PENDAHULUAN

Agenda pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Hak-hak dasar masya-

rakat di bidang pendidikan dalam bentuk bebas dari buta aksara, kebodohan, keterbelakangan dan putus sekolah. Sedangkan hak-hak dasar masyarakat di bidang kesehatan antara lain meliputi bebas dari penularan penyakit, kurang gizi, kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan lain-lain.

¹Hasil Penelitian

²Staf Pendidik pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: s.yusran@gmail.com

Keseluruhan hak tersebut diperukan untuk terciptanya masyarakat yang berkualitas. Baik intelektual, emosional, spiritual, dan fisik maupun kualitas teknisnya yang berorientasi kepada pengembangan produktivitas mereka.

Semangat desentralisasi yang di bawah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan swakelola pembangunan diwilayahnya. Agar tetap berpihak pada keadilan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di daerah yang telah diperbaharui menjadi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 ditetapkan untuk mengawal Pengarusutamaan Gender di daerah. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Di dalam visi misi Provinsi Sulawesi Tenggara, PUG sudah menjadi salah satu strategi pembangunan ke depan. Untuk menjawab persoalan pembangunan sumber daya manusia, maka pemerintah telah menencanakan pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui program Bahteramas sebagai wujud pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, yang kaya maupun miskin.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara menunjukkan jumlah orang miskin berkisar 17,05 persen dari keseluruhan populasi penduduk. Meski demikian, secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia di provinsi ini masih kategori rendah. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional terbaru (2011) menunjukkan Sulawesi Tenggara hanya berada di peringkat 25 dari 33 provinsi di Indonesia. Masih rendahnya indeks pema-

ngunan manusia Sulawesi Tenggara tidak dapat dilepaskan dari belum berpihaknya pembangunan pada peningkatan kualitas hidup seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang termarjinalkan seperti perempuan dan orang miskin.

Untuk mewujudkan berbagai upaya perbaikan kualitas SDM, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan visi misi dalam strategi pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui program “Bahteramas” sebagai wujud pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang miskin. Bahteramas fokus pada tiga program ini yaitu pembebasan biaya operasional pendidikan sampai pada tingkat SMA; pembebasan biaya pengobatan untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat miskin sampai dengan rawat inap kelas 3 dan pemberian bantuan 100 juta untuk setiap desa/kelurahan.

Salah satu bentuk partisipasi dan dukungan nyata atas pembangunan SDM Sulawesi Tenggara maka Pusat Studi Gender (PSG) dan Pemberdayaan Perempuan Universitas Halu Oleo Kendari merasa perlu untuk berperan serta membantu dan mengawal program Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Peran tersebut diwujudkan dengan adanya berbagai kegiatan mengikutsertakan atau melibatkan perempuan dan orang miskin di musrenbang desa; sosialisasi, pelatihan perencanaan anggaran yang responsif gender dan melakukan pendampingan dalam pendistribusian dana bantuan desa/kelurahan, serta membantu pemerintah mengawal hasil musrenbangdes ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten agar hasil musrenbang betul-betul merupakan aspirasi masyarakat.

Pusat Studi Gender dan Pemberdayaan Perempuan Universitas Haluoleo bekerjasama LEAD Project UNDP Indonesia melakukan survei tentang partisipasi perempuan dan orang miskin melalui perencanaan dan responsif gender. Survey ini

akan melihat sejauhmana masyarakat akan paham pentingnya keterlibatan mereka di dalam pembangunan.

Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman dan pengetahuan perempuan dan orang miskin tentang pentingnya keterlibatan mereka di dalam pembangunan dan pemahaman mereka tentang haknya berpartisipasi di dalam pembangunan melalui musrenbang, serta harapan mereka tentang langkah-langkah selanjutnya.

B. METODE PENELITIAN

Survei ini akan fokus pada perempuan dan orang miskin di Kabupaten Konawe sebagai populasi dan sampel yang telah ditentukan dari beberapa representatif yang mewakili beberapa kecamatan wilayah kerja UNDP.

Responden yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 150 orang. Mereka dipilih secara *purposive random*. Disebut *purposive* karena hanya mereka yang memenuhi kriteria perempuan dan/atau miskin saja yang menjadi sampel. Disebut *random* karena mereka dipilih secara acak dari keseluruhan penduduk yang bermukim di desa yang menjadi tempat penarikan sampel.

Wilayah survei yang dipilih terdiri dari lima belas desa yang berada di lima wilayah kecamatan di Kabupaten Konawe. Berikut ini nama kecamatan dan desa tempat responden berdomisili:

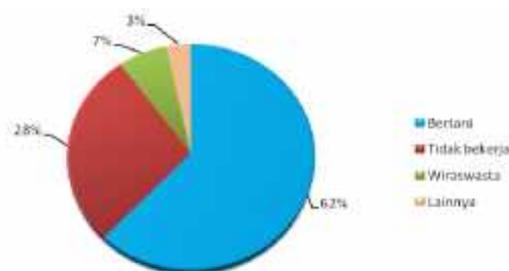
1. Kecamatan Unaaha, yakni kelurahan Unaaha dan Tuoy;
2. Kecamatan Wawotobi, terdiri dari dua desa, yakni Desa Korumba dan Desa Kukuluri;
3. Kecamatan Pondidaha, terdiri dari lima desa, yakni Desa Laloika, Desa Pumbinisi, Desa Mumundowu, Desa Lalodangge, Desa Ahuawatu;

4. Kecamatan Wonggeduku, terdiri dari tiga desa, yakni: Desa Wonggeduku, Desa Lamokuni, Desa Tawarolondo.
5. Kecamatan Amonggedo, terdiri dari tiga desa, yakni: Desa Benua, Desa Mendikonu, dan Desa Dunggu.

Dari 150 orang responden tersebut, 84 orang yang berjenis kelamin perempuan dan sisanya (66 orang) berjenis kelamin laki-laki. Responden perempuan lebih banyak karena mereka memenuhi syarat perempuan saja atau perempuan dan orang miskin. Sementara responden laki-laki yang dipilih karena hanya memenuhi kriteria sebagai orang miskin. Survei menetapkan kriteria orang miskin adalah mereka yang antara lain tidak memiliki tempat tinggal (rumah) permanen atau tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lebih dari separuh responden bekerja sebagai petani (62%). Sekitar 28% responden yang tidak bekerja. Sebagian besar dari mereka adalah ibu rumah tangga. Responden yang berwiraswasta jumlahnya 7%. Mereka sebagian besar berdagang atau membuka usaha kecil. Sisanya atau sekitar 3% responden bekerja sebagai tenaga honorer pegawai negeri, tukang batu, tukang cuci, dan penjahit. Dalam bentuk grafik, distribusi persentase pekerjaan responden disajikan sebagai berikut:

Grafik 1. Distribusi Persentase Pekerjaan Responden



n = 150

Sumber: Diolah dari data primer 2010

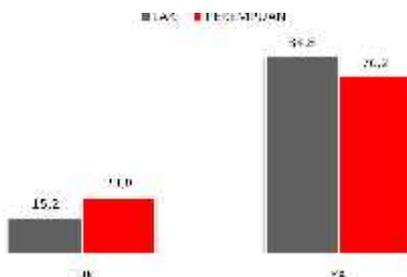
Keseluruhan data dalam survei ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Sebelum menjalankan tugasnya, para enumerator terlebih dahulu dilatih untuk memudahkan mereka saat mengumpulkan data. Latihan dan simulasi ini juga dimaksudkan untuk memastikan tingkat keabsahan data yang diperoleh.

C. HASIL SURVEY BERBENTUK PROFILE

1. Musrenbang

Musrenbang adalah singkatan dari musyawarah perencanaan pembangunan. Istilah ini sangat populer di kalangan perempuan dan orang miskin. Mayoritas responden pernah mendengar kata “musrenbang” (80%). Dari mayoritas responden tersebut, laki-laki sedikit lebih familiar dengan istilah ini dibandingkan dengan perempuan. Meski perbedaannya tidak terlalu mencolok.

Grafik 2. Distribusi Persentase Pengetahuan atas Musrenbang Menurut Jenis Kelamin



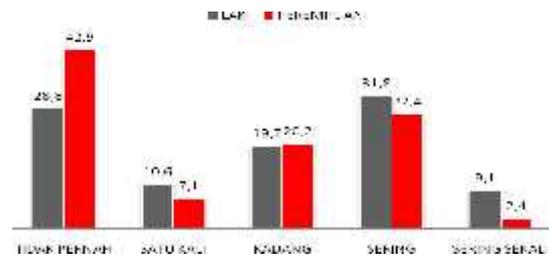
n = 150

Sumber: Diolah dari data primer 2010

Seperti yang terlihat di Grafik 2, sebagian besar responden laki-laki menjawab “iya” ketika ditanya apakah mereka pernah mendengarkan kata musrenbang. Selain familiar, secara keseluruhan, lebih dari separuh responden (63,3%) pernah mengikuti musrenbang, minimal sekali. Namun melihat kecenderungannya, frekuensi kehadiran perempuan lebih rendah dibandingkan de-

ngan perempuan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak diundang atau waktu pertemuannya bertepatan dengan saat mereka harus bekerja. Secara detail distribusinya terlihat dalam Grafik 3.

Grafik 3. Distribusi Persentase Kehadiran dalam Musrenbang Menurut Jenis Kelamin

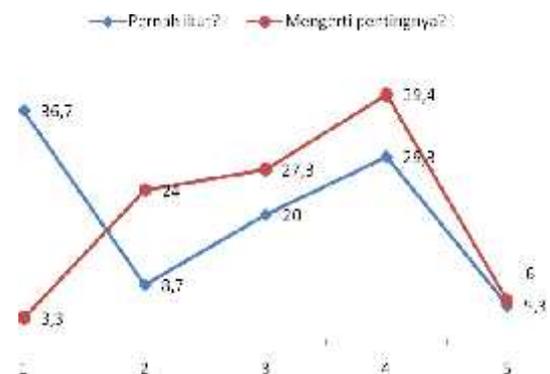


n = 150

Sumber: Diolah dari data primer 2010

Meski lebih dari separuh perempuan dan orang miskin pernah mengikuti musrenbang (minimal sekali), tidak sampai separuh dari mereka paham pentingnya musrenbang. Hanya 45,4% dari responden yang mengerti (dan sangat mengerti). Lebih banyak responden (54,6%) menjawab kurang mengerti, tidak mengerti bahkan tidak mengerti sama sekali urgensi musrenbang.

Grafik 4. Distribusi Persentase Kehadiran dan Pemahaman Responden tentang Pentingnya Musrenbang



n = 150

Sumber: Diolah dari data primer 2010

Grafik 5. Distribusi Persentase Pemahaman Responden Atas Pentingnya Musrenbang menurut Jenis Kelamin



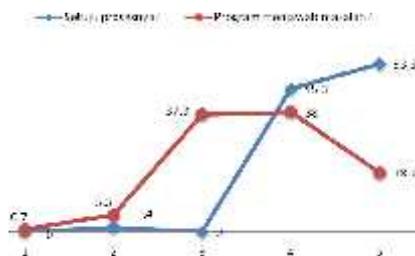
n = 150

Sumber: Diolah dari data primer 2010

Dari 45,4% dari responden yang mengerti (dan sangat mengerti) akan pentingnya musrenbang, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tingkat pemahaman laki-laki akan pentingnya musrenbang sedikit lebih mencolok dibandingkan dengan perempuan. Tampak bahwa sekitar 62 persen perempuan kurang mengerti, tidak mengerti, bahkan tidak mengerti sama sekali urgensi musrenbang.

Meski sebagian besar responden tidak mengerti, tetapi mereka menyetujui proses dan mekanisme musrenbang sebagai bentuk atau forum perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Ini terlihat dalam kecenderungan jawaban responden seperti yang tampak dari Grafik 6. Mayoritas responden setuju (dan sangat setuju) dengan proses musrenbang.

Grafik 6. Distribusi Persentase Penilaian Responden Atas Proses Musrenbang dan Kemampuan Musrenbang dalam Menjawab Masalah Perempuan juga Orang Miskin



n = 150

Sumber: Diolah dari data primer 2010

Grafik 6 juga menunjukkan perseptujuan mayoritas responden atas proses musrenbang, tidak serta merta berdampak pada penilaian bahwa program yang diusulkan musrenbang dapat menjawab masalah perempuan dan orang miskin. Hanya separuh dari mereka yang memberi penilaian positif kemanfaatan dari musrenbang.

Penilaian positif tersebut diberikan oleh lebih banyak responden laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Ini dapat dipahami karena proses musrenbang didominasi oleh laki-laki. Program yang diusulkan dan kemudian diimplementasikan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan laki-laki. Secara detail distribusinya dapat dilihat dalam Grafik 7.

Grafik 7. Distribusi Persentase Penilaian atas Kemampuan Musrenbang dalam Menjawab Masalah Perempuan & Orang Miskin menurut Jenis Kelamin



n = 150

Sumber: Diolah dari data primer 2010

Mereka yang memberi penilaian negatif atas kemampuan musrenbang menjawab masalah perempuan dan orang miskin besarnya sekitar 43,3 persen. Secara umum, alasan penilaian tersebut dikelompokkan dalam dua kategori besar. Musrenbang dinilai negatif karena: a) belum terealisasinya program yang mereka usulkan seperti pengerukan bendungan, bantuan modal usaha, dan pengerasan jalan desa; b) program yang mereka usulkan berbeda dengan yang direalisasikan. Contohnya permintaan pengadaan posyandu yang realisasinya diganti dengan perbaikan drainase.

Sebagian besar program yang diusulkan perempuan dan orang miskin dalam musrenbang bersifat fisik. Misalnya, perbaikan atau pembuatan jalan desa, perbaikan drainase/irigasi/tanggul, dan pengadaan air bersih atau pembuatan sumur. Seperti yang tampak dalam Matriks berikut, tidak semua program yang masuk dalam peringkat sepuluh besar akan mendapat prioritas untuk direalisasikan. Perbaikan/pembuatan kantor Balai Desa dan masjid adalah dua usulan yang tidak masuk kategori prioritas namun diutamakan dalam realisasinya.

Ada pula program yang masuk dalam peringkat sepuluh besar namun tidak dianggap terlalu mendesak pemenuhannya seperti pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu). Listrik adalah satu-satunya hal yang dinilai penting oleh perempuan dan orang miskin meski tidak masuk dalam sepuluh program besar yang diusulkan saat musrenbang.

Matriks 1. Program yang Diusulkan, Terealisasi, dan yang Belum Terealisasi namun Dinilai Penting oleh Perempuan dan Orang Miskin

NO	DIUSULKAN	DIREALISASIKAN	BELUM TAPI PENTING
1	Jalan desa	Jalan desa	Jalan desa
2	Drainase/irigasi/ tanggul	Drainase/irigasi/ tanggul	Drainase/irigasi/ tanggul
3	Air bersih/sumur	TK	Perbaikan rumah
4	Taman Kanak-kanak (TK)	Posyandu	Modal usaha
5	Posyandu	Sumur/air bersih	Posyandu
6	Fasilitas MCK	Fasilitas MCK	TK
7	Modal usaha	Modal usaha	Pengerukan bendungan
8	Pengerukan bendungan	Balai desa*	Sumur/air bersih
9	Pembangunan Pustu	Perbaikan rumah	Fasilitas MCK
10	Perbaikan rumah	Masjid*	Listrik*

Sumber: Diolah dari data primer 2010

Keterangan:

* = tidak masuk dalam 10 besar program yang diusulkan

Bila melihat sebaran program yang diusulkan, terealisasi, serta yang dianggap penting oleh perempuan dan orang miskin, secara umum tidak ada hal yang baru. Apa yang diusulkan, itu pula yang direalisasikan. Hanya peringkat pemenuhan dan asumsi urgensinya yang berbeda-beda. Meski tidak masuk dalam peringkat sepuluh besar, berikut ini sejumlah program yang juga diusulkan perempuan dan orang miskin dalam musrenbang, antara lain:

- a. Pelatihan keterampilan bagi perempuan dan orang miskin
- b. Pengadaan listrik
- c. Pembuatan/perbaikan Balai Desa dan masjid
- d. Percetakan/perluasan sawah
- e. Bantuan Langsung Tunai kepada orang miskin
- f. Bantuan traktor, ternak, pupuk, alat pertanian, pertukangan, tenun, mesin jahit, dan seng.
- g. Penanganan banjir saat musim hujan.
- h. Pengobatan gratis.
- i. Pembuatan/rehabilitasi pasar dan jembatan.
- j. Pembuatan balai keterampilan desa.
- k. Pendirian sekolah dan koperasi.
- l. Ganti rugi tanaman yang terkena jalan.

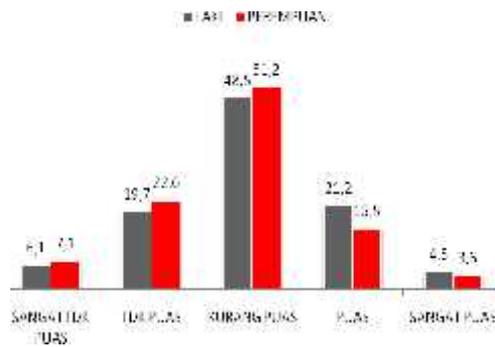
Selain itu, masih ada pula beberapa program yang belum terealisasi namun dianggap penting oleh perempuan dan orang miskin, yaitu:

- a. Percetakan/perluasan sawah.
- b. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu).
- c. Pembuatan/perbaikan jembatan.
- d. Pelatihan perempuan dan orang miskin.
- e. Bantuan Langsung Tunai kepada orang miskin.
- f. Pengadaan seng, bantuan alat pertukangan, ternak, dan beras miskin.
- g. Penanganan banjir saat musim hujan.
- h. Pembuatan balai keterampilan desa.
- i. Pendirian sekolah dan koperasi.

2. Partisipasi

Bila mengukur tingkat partisipasi perempuan dan orang miskin, Grafik 8 menunjukkan bahwa mayoritas responden (78%), baik laki-laki maupun perempuan, masih belum puas dengan keterlibatan mereka.

Grafik 8. Distribusi Persentase Kepuasan Partisipasi dalam Pembangunan menurut Jenis Kelamin



n = 150

Sumber: Diolah dari data primer 2010

Berikut beberapa kendala musrenbang yang menjadi alasan ketidakpuasan responden yang berhasil dikumpulkan melalui survei, antara lain:

- Jarang/tidak diundangnya perempuan dan orang miskin;
- Peserta musrenbang sudah diatur sebelumnya jadi usulannya tidak mewakili kepentingan perempuan dan orang miskin;
- Perempuan dan orang miskin tidak diberi kesempatan berbicara;
- Musyawarah didominasi aparat desa;
- Perempuan dan orang miskin malu dan merasa tidak memiliki pengetahuan atas topik yang dimusyawarahkan;
- Banyak usulan yang belum tercapai atau direalisasikan;
- Tidak percaya pada pemerintah;
- Tidak ada tindak lanjut dari usulan;
- Terlalu banyak usulan jadi sulit disepakati;
- Kurangnya dana untuk merealisasikan program;

- Warga malas ikut pertemuan dan lebih mengutamakan pekerjaan.

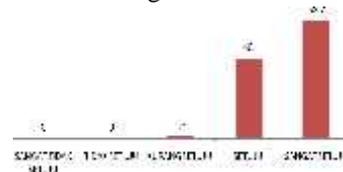
Jika melihat rangkuman kendala-kendala tersebut, secara umum kekurangan musrenbang dalam perspektif perempuan dan orang miskin meliputi tiga aspek. Pertama, penyelenggaraan. Kedua, kepercayaan. Ketiga, kapasitas dan kesadaran warga. Kelompok kendala tersebut disajikan dalam Matriks 2.

PENYELENGGARAAN	KEPERCAYAAN	KAPASITAS
<ul style="list-style-type: none"> - Jarang/tidak diundang - Peserta musrenbang sudah diatur sebelumnya - Tidak diberi kesempatan berbicara. - Musyawarah didominasi aparat desa - Terlalu banyak usulan jadi sulit disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan belum direalisasikan - Tidak percaya pada pemerintah - Tidak ada tindak lanjut dari usulan - Kurang dana 	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan dan orang miskin malu dan merasa tidak memiliki pengetahuan - Warga malas, lebih mengutamakan pekerjaan.

Sumber: Diolah dari data primer 2010

Dari tingkat kepuasan yang masih rendah sebagaimana terlihat dalam Grafik 8, dapat dipahami bila kemudian mayoritas responden (98%) masih menginginkan keterlibatan yang lebih produktif. Perempuan dan orang miskin tidak sekedar hadir dalam musrenbang tetapi juga diajak untuk berpendapat dan diapresiasi pendapatnya. Partisipasi tersebut menurut mereka perlu dijamin dan dilindungi dalam bentuk peraturan daerah seperti yang terlihat dalam Grafik 9.

Grafik 9. Distribusi Persentase Penilaian Responden tentang Perlunya Perda Partisipasi Perempuan dan Orang Miskin



n = 150

Sumber: Diolah dari data primer 2010

Sebagai tambahan, perempuan dan orang miskin menyarankan lima poin penting berkenaan dengan keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan, antara lain:

- a. Perempuan dan orang miskin disertakan, diberdayakan, dan diapresiasi usulannya berkaitan dengan pembangunan.
- b. Perlu ada latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas perempuan dan orang miskin agar lebih menguasai segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup mereka.
- c. Sebaiknya musrenbang disosialisasikan arti pentingnya agar warga menjadi lebih paham.
- d. Usulan program yang telah diajukan agar direalisasikan, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat.
- e. Ada alokasi anggaran (APBD) untuk program yang terkait langsung dengan perempuan dan orang miskin.
- f. Program direalisasikan secara merata agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan temuan yang telah tersaji, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Istilah “musrenbang” (musyawarah perencanaan pembangunan) populer di kalangan perempuan dan orang miskin. Mereka pun kerap mengikutinya.
- b. Tidak sampai separuh dari perempuan dan orang miskin yang mengetahui arti penting musrenbang.
- c. Sebagian besar perempuan dan orang miskin menyetujui proses musrenbang namun tidak semua dari mereka menilai program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan mampu menjawab masalah perempuan dan orang miskin.

- d. Sebagian besar perempuan dan orang miskin merasa tidak puas dengan partisipasi mereka dalam pembangunan. Oleh karena itu mereka menganggap penting untuk dilibatkan secara optimal.

2. Rekomendasi

Untuk konteks kabupaten Konawe, penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender Universitas Haluoleo Kendari menunjukkan sebagian besar perempuan dan orang miskin belum puas dengan partisipasi mereka dalam pembangunan. Untuk menguatkan posisi dan keikutsertaan mereka dalam penyusunan kebijakan pembangunan, mereka menyatakan perlu adanya payung hukum yang dapat menaungi partisipasi mereka. Produk hukum tersebut diharapkan dapat menaungi kepentingan pemerintah, perempuan dan orang miskin yang akan membawa pada kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Lead –UNPD Program Dokumen 2009.
- Pusat Studi Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dokumen Program Partisipasi Perempuan dan Orang Miskin di dalam Pembangunan yang Responsif Gender melalui Musrenbang 2009.
- Peraturan Menteri Dalam Megeri No. 15 tahun 2008 yang diperbaharui menjadi Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- Yusran, S. 2009. Pengarusutamaan Gender sebagai Strategi Pembangunan Daerah.
- Yusran, S. 2009. Gender, Perempuan dan Kesehatan Reproduksi; Proceeding Konferensi International: the WAS World Conference for Sexual Health.
- Yusran, S. 2008. Gender dan Pembangunan: Modul Pengarusutamaan Gender pada Pendidikan Diklat

Pimpinan III: Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.